



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU FIRMAN WIJAYA
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 515682

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.735.190.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 510 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , WARISAN Rp. 1.100.000.000
2. Tanah Seluas 247 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 125.000.000
6. Tanah Seluas 5673 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 170.190.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 215.500.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, HONDA ADV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 113.500.000

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 403.111.950



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.467.301.950
III. HUTANG	Rp.	405.748.028
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.061.553.922

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.